



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Jl. Ade Irma No. 1254, Palembang

 Dokumen Desember 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan panduan pelaksanaan dan arah kegiatan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta bahan koordinasi Instansi terkait agar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yaitu **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”** dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 dengan memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun sebelumnya, tujuan sasaran program, dan kegiatan serta indikatornya dan sumber dana yang di butuhkan untuk tahun 2025.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat berjalan sesuai harapan sehingga Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus meningkat.

Palembang, Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196903281989082002

DAFTAR ISI

	Hal
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistem Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	36
2.4. Review Tahapan Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran	54
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	65
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	65
4.2 Prioritas Perangkat Daerah	77
BAB V PENUTUP.....	78
LAMPIRAN	
- Tabel Renja DPPP Provinsi Sumatera Selatan 2025	
- Rekapitulasi Jenis belanja yang dinntput pada SIPD	

1.1. Latar Belakang

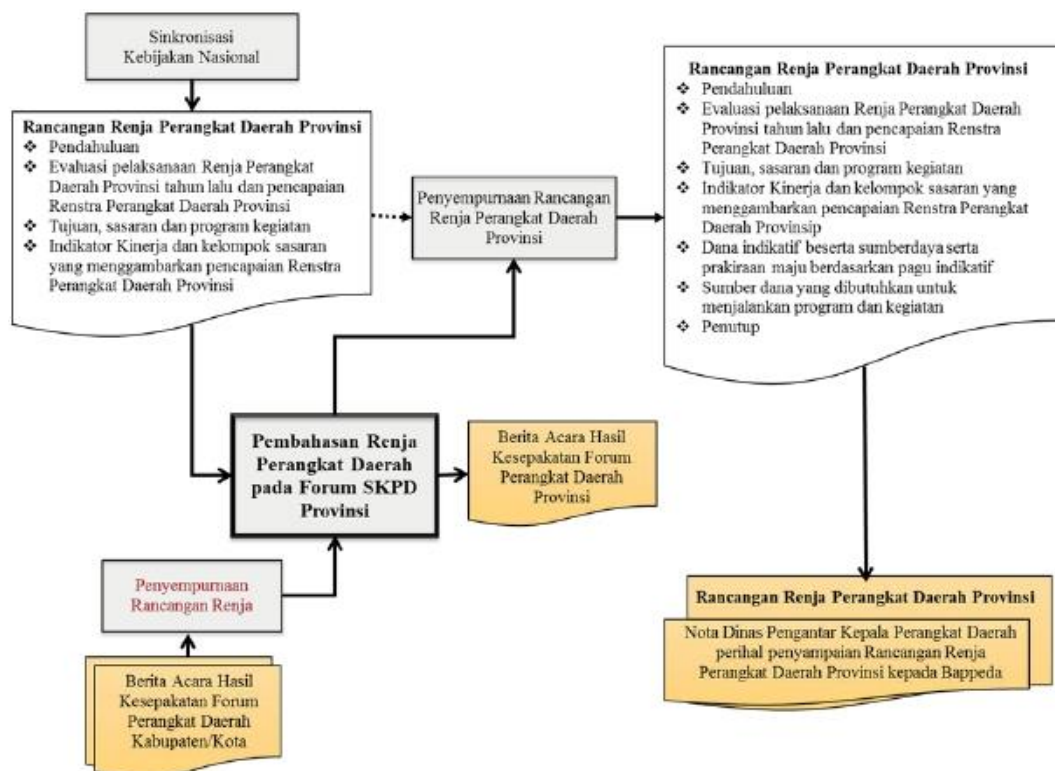
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan pada 24 Maret 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 dan mengawal pelaksanaan tahun pertama dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, serta mengacu juga pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPPPA Provinsi Sumsel, evaluasi pelaksanaan Renja DPPPA Provinsi Sumsel tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DPPPA Provinsi Sumsel. Selanjutnya, Renja DPPPA Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

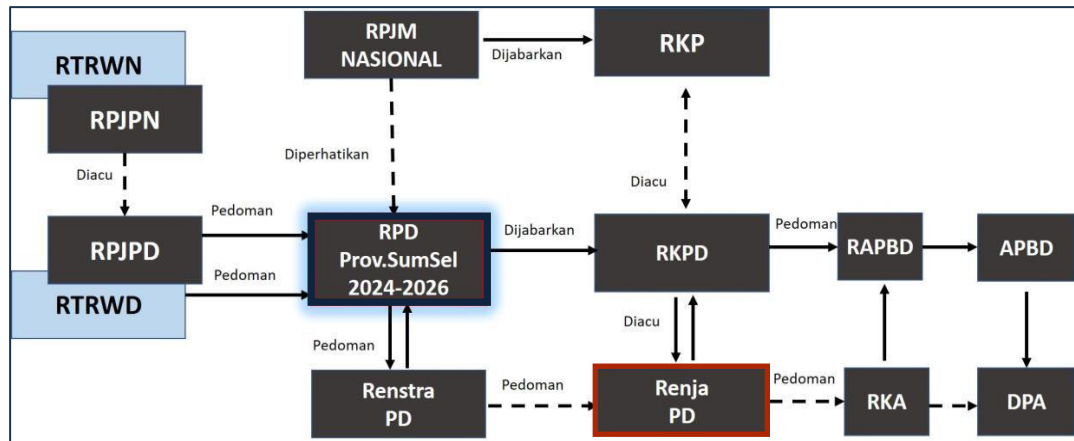


Gambar 1: Alur Proses Penyusunan Rancangan Renja

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.



Gambar 2 : Hubungan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Daerah

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun pedoman rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah terwujudnya rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terarah dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review

terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Setiap dokumen perencanaan harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, maka Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga harus melakukan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan guna mengetahui program dan kegiatan apakah telah memenuhi target, tidak memenuhi target atau melebihi target yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui :

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan;
- c. Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan proses penyusunan Renja ini, yaitu :

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagai berikut :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
 - a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 5.000.000,-
- Realisasi Anggaran Sebesar : Rp. 4.985.000,- atau 99,70 %
- Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawab sesuai kebutuhan.
- Evaluasi : sesuai perencanaan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 5.000.000,-
Realisasi Anggaran Sebesar : Rp. 4.992.000,- atau 99,84 %
- Hasil kegiatan adalah : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawab sesuai kebutuhan.
Evaluasi : sesuai perencanaan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran Sebesar : Rp 6.512.082.200,-
Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 6.147.474.424,- atau 94,40 %
Hasil kegiatan adalah : Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN
Permasalahan: tidak ada permasalahan, pertanggungjawab sesuai kebutuhan.
Evaluasi : Perencanaan dihitung dari kebutuhan ASN untuk DPPPA
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 675.700.000,-
Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 672.981.000,- atau 99,60 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Tenaga Honor Administrasi Perkantoran.

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 183.520.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 179.869.500,- atau 98,01 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan.

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 50.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 49.943.556,- atau 99,89 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Laporan Keuangan DPPPA

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : sesuai perencanaan

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 35.000.000,-
 - Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 22.820.000,- atau 65,20 %
 - Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah DPPPA
 - Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.
 - Evaluasi : sesuai perencanaan

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 35.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 34.663.778,- atau 99,04 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya Benchmarking SAKIP dan Evaluasi SAKIP DPPA Prov. Sumsel

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung berdasarkan analisa kebutuhan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 15.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 14.973.000,- atau 99,82 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 50.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 49.755.000,- atau 99,51%

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggung jawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 160.000.000,-
 Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 158.419.560,- atau 99,01 %
 Hasil kegiatan adalah : Tersedianya bahan logistik kantor berupa alat tulis dan bahan kebersihan.
 Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaan sesuai kebutuhan.
 Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 60.000.000,-
 Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 39.914.000,- atau 99,79 %
 Hasil kegiatan adalah : Tersedianya cetak dan penggandaan
 Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaan sesuai kebutuhan.
 Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 20.000.000,-
 Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 19.149.000,- atau 95,75 %
 Hasil kegiatan adalah : Tersedianya makanan dan minuman saat rapat/pertemuan.
 Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaan sesuai kebutuhan.
 Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 415.000.800,-
 Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 414.264.545,- atau 99,82 %
 Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah, Luar daerah dan Rapat Koordinasi PP PA Kab/Kota se Sumatera Selatan.
 Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaan sesuai kebutuhan.
 Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 275.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 235.094.614,- atau 85,49 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya 9 jaringan jenis telpon, listrik, air, dan internet yang dibayar

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan ditambah perkiraan tarif naik.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 30.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 29.645.000,- atau 98,82%

Hasil kegiatan adalah : Terepeliharanya 4 jenis peralatan dan perlengkapan kantor (taman, router internet, AC, dan Jasa Perbaikan listrik)

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 105.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 104.410.000,- atau 99,44%

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 275.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 270.654.560,- atau 98,42%

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor sebanyak 17 unit

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 19.895.000,- atau 99,48%

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya 5 jenis peralatan dan mesin yang dipelihara

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 73.600.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 73.336.479,- atau 99,64 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya gedung kantor yang dipelihara

Permasalahan : tidak ada permasalahan, pertanggungjawaban sesuai kebutuhan.

Evaluasi : Perencanaan dihitung sesuai kebutuhan

- **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- a. **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 375.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 364.892.998,- atau 97,30 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya 5 jenis kegiatan Pokja PUG yang difasilitasi

Permasalahan : Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung Pelaksanaan PUG di Daerah

Evaluasi : Kegiatan Pokja PUG yang telah difasilitasi harus berkelanjutan sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

- b. **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 200.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 187.266.380,
- atau 93,63 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum untuk 150 orang perempuan.

Permasalahan : Masih kurangnya kualitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan diantaranya bidang sosial, politik dan hukum.

Evaluasi : Kedepannya perlu mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar stakeholders yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 559.394.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 453.103.000,- atau 81,00 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya Monev APE pada 17 Kab/Kota

Permasalahan : Masih perlu peningkatan komitmen dan peran para pimpinan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Evaluasi : Meningkatkan jejaring sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp 1.020.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 723.405.985, atau 70,92 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya 24 jenis kegiatan peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak organisasi perempuan

Permasalahan : Masih kurangnya kualitas dan peran lembaga/organisasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Evaluasi : Kedepannya perlu mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar stakeholders yang berperan

dalam peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak organisasi perempuan.

- **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- a. **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi.

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 36.844.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 13.265.050,- atau 36,00 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Permasalahan : Menu rekening belanja pada DAK NF PPA belum mengakomodir seluruh kebutuhan pelayanan yang sifatnya unpredictable, ada menu yang terlalu rigid/detil

Evaluasi : Diharapkan adanya fleksibilitas dalam penggunaan Anggaran DAK NF PPA.

- b. **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 15.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 14.875.524,- atau 99,17 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya penanganan kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO di Kab/Kota

Permasalahan : Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan.

Evaluasi : Petuga Lembaga Pelayanan perempuan dan anak telah melaksanakan penanganan kasus dengan baik.

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 162.715.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 112.115.500,- atau 68,90 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya 68 Orang Tenaga pendamping lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan.

Permasalahan : Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan.

Evaluasi : Petuga Lembaga Pelayanan perempuan dan anak telah melaksanakan penanganan kasus dengan baik.

- Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 173.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 157.631.800,- atau 91,12 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya 6 jenis kegiatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan.

Permasalahan : Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan.

Evaluasi : Meningkatkan sosialisasi kepada lembaga/instansi dalam layanan terhadap perempuan dan anak.

- **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 100.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 71.020.500,- atau 71,02 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya 100 orang peserta peningkatan kapasitas penyedia layanan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi.

Permasalahan : Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pelayanan peningkatan kualitas keluarga.

Evaluasi : Diharapkan baik pemerintah pusat ataupun daerah mampu menyusun program agar perempuan mampu optimal dalam perannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluarga.

- **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**

- Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 95.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 92.718.935,- atau 97,60 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya Kegiatan pengumpulan pengelolaan data gender dan anak.

Permasalahan : perbedaan format yang ada di dalam instansi anggota pokja data dengan format yang dibutuhkan di Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) terpilah, beberapa instansi terkait belum memenuhi data yang dibutuhkan di Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Evaluasi : Membuat Format sesuai kebutuhan di Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), Meningkatkan koordinasi dengan instansi anggota pokja data untuk updating data.

- Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 40.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 39.902.617,- atau 99,76 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya Media Komunikasi dan Informasi Gender dan Anak.

Permasalahan : keterlambatan berita dari bidang teknisnya sedangkan media sosial informasi membutuhkan berita yang update, masih kurangnya fasilitas untuk media informasi.

Evaluasi : Membuat grup WA khusus informasi berita terbaru, memperbaharui SK Informasi menjadi Media Komunikasi dan Informasi Gender dan Anak dengan menambahkan anggota sehingga dapat membackup apabila salah satu berhalangan atau tidak ada di lokasi kegiatan, merencanakan kebutuhan fasilitas penunjang untuk media informasi.

- **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**

- a. **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**

- Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 186.310.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 153.111.700,- atau 82,30 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di 17 Kab/Kota

Permasalahan : Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang paham Konvensi Hak Anak sehingga implementasi pencapaian indikator KLA melalui berbagai program kegiatan belum optimal.

Evaluasi : Meningkatkan advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan khususnya yang termasuk dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Kota untuk melakukan percepatan KLA.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 60.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 53.111.700,- atau 88,52 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya pendampingan peningkatan kualitas hidup anak di 7 Kabupaten/Kota di OKI,OI, Empat Lawang, OKU, OKUS, Lahat, dan Pagar Alam.

Permasalahan : Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang paham Konvensi Hak Anak sehingga implementasi pencapaian indikator KLA melalui berbagai program kegiatan belum optimal.

Evaluasi : Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi serta mengoptimalkan jejaring perlindungan anak, baik pemerintah, Lembaga Layanan Anak dan Forum Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 180.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 25.019.000,- atau 13,90 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya fasilitasi kegiatan partisipasi anak (HAN, HAN Prov. Sumsel dan Forum Anak)

Permasalahan : Karena Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan dilakukan secara virtual.

Evaluasi : Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan : meningkatkan pemahaman dan komitmen pihak terkait untuk melibatkan anak dalam pembangunan, serta mendorong pembentukan forum anak sampai ke desa/kelurahan.

- **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 17.546.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 14.538.000,- atau 82,86 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Permasalahan :

Evaluasi :

b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 20.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 17.840.000,- atau 89,20 %

Hasil kegiatan adalah : Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang kasusnya ditangani

Permasalahan :

Evaluasi :

- Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 70.000.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 46.787.500,- atau 66,84 %

Hasil kegiatan adalah : Terlaksananya kegiatan sosialisasi informasi tentang pencegahan perkawinan anak.

Permasalahan :

Evaluasi :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 166.603.000,-

Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 25.550.000,- atau 15,34 %

Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Permasalahan : Menu rekening belanja pada DAK NF PPA belum mengakomodir seluruh kebutuhan pelayanan yang sifatnya unpredictable, ada menu yang terlalu rigid/detil

Evaluasi : Diharapkan adanya fleksibilitas dalam penggunaan Anggaran DAK NF PPA.

- **Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.**
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 Alokasi Anggaran Sebesar : Rp. 622.915.000,-
 Realisasi Anggaran Sebesar : Rp 354.649.100,- atau 56,93 %
 Hasil kegiatan adalah : Terpenuhinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Khusus Anak
 Permasalahan : Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.
 Evaluasi : Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan diharapkan di tahun berikutnya kegiatan dapat dilakukan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2020
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun ... (n-3)		Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)						Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020				
			Target Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10= 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																	
2.02.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100	8.566.662.830	0	0	100	1.452.960.000	100	1.373.043.276	100	94,50	100	1.618.458.170	100	2.991.501.446	100,00	34,92
2.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dan benda pos yang dibeli	1800	32.000.000	0	0	0	0	0	-	0	0,00	500	6.240.000				
2.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	6	1.150.000.000	0	0	6	180.000.000	5	132.299.692	83,33	73,50	6	180.000.000	5	312.299.692	83,33	27,16
2.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK, Jasa Service Penggantian Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas	15	907.800.000	0	0	13	147.800.000	13	143.098.783	100	96,82	13	147.800.000	13	290.898.783	86,67	32,04
2.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang di Bayar	22	121.800.000	0	0	2	8.400.000	2	8.400.000	100	100,00	4	16.800.000	2	25.200.000	9,09	20,69
2.02.01.01.08	Penyediaan Kebersihan Kantor	Jumlah alat bahan Kebersihan Kantor yang disediakan	40	400.000.000	0	0	40	70.000.000	40	69.726.350	100	99,61	40	108.000.000	40	177.726.350	100,00	44,43
2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	5	67.000.000	0	0	3	8.000.000	3	7.925.000	100	99,06	5	8.000.000	5	15.925.000	100,00	23,77
2.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang di Sediakan	40	900.000.000	0	0	40	120.000.000	48	118.076.000	120	98,40	40	137.508.170	48	255.584.170	120,00	28,40
2.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	15	400.000.000	0	0	15	50.000.000	26	49.809.000	173,333	99,62	15	60.000.000	26	109.809.000	173,33	27,45
2.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	12	70.000.000	0	0	3	10.000.000	10	9.975.000	333,333	99,75	12	10.000.000	12	19.975.000	100,00	28,54
2.02.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Rapat/Pertemuan yang disediakan Makanan dan Minuman	140	97.600.000	0	0	40	30.000.000	37	30.000.000	92,5	100,00	30	30.000.000	67	60.000.000	47,86	61,48
2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Outsourcing yang dibayar	18	3.165.862.830	0	0	18	608.760.000	18	594.900.000	100	97,72	23	680.910.000	23	1.275.810.000	127,78	40,30
2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tentor SKJ yang diberi honor	1	54.600.000	0	0	0	0	0	-	0	0,00	1	13.200.000	1	13.200.000	100,00	24,18
2.02.01.01.33	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri yang dilaksanakan	210	1.150.000.000	0	0	35	220.000.000	66	208.833.451	188,571	94,92	40	13.200.000	106	222.033.451	50,48	19,31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun ... (n-3)		Target dan Realiasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)						Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020					
							Target Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10= 5+7+9		11=10/4		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100	2.139.698.170	0		0	100	214.248.170	100	208.625.040	100	97,38	100	669.500.000	100	878.125.040	100,00	41,04
2.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	3	650.000.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	1	520.000.000	1	520.000.000	33,33	80,00
2.02.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	10	695.000.000	0		0	15	165.000.000	15	159.845.040	100	96,88	5	80.000.000	15	239.845.040	150,00	34,51
2.02.01.02.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk pemberdayaan ekonomi perempuan	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10	185.000.000	0		0	10	15.000.000	10	14.700.000	100	98,00	0	0	10	14.700.000	100,00	7,95
2.02.01.02.16	Pengelolaan Website	Jumlah Website yang diupdate	1	70.000.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	1	10.000.000	0	10.000.000	0,00	14,29
2.02.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	4	119.698.170	0		0	3	14.248.170	3	14.130.000	100	99,17	3	59.500.000	3	73.630.000	75,00	61,51
2.02.01.02.46	Pembuatan Website Dinas PP PA	Jumlah Website yang dibuat	1	20.000.000	0		0	1	20.000.000	1	19.950.000	100	99,75	0	0	1	19.950.000	100,00	99,75
2.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	625.550.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	100	160.000.000	0	160.000.000	0,00	25,58
2.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan pakaian Dinas	Jumlah pegawai yang disediakan seragam dan atribut	160	350.550.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	80	160.000.000	80	160.000.000	50,00	45,64
2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	640.900.000	0		0	100	120.900.000	100	116.113.516	100	96,04	100	165.000.000	100	281.113.516	100,00	43,86
2.02.01.05.04	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	30.750.000	0		0	3	30.750.000	5	30.115.202	166,667	97,94			5	30.115.202	166,67	97,94
2.02.01.05.05	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	127	240.700.000	0		0	3	40.700.000	3	37.966.987	100	93,28	4	55.000.000	3	92.966.987	2,36	38,62
2.02.01.05.06	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	25.750.000	0		0	3	25.750.000	4	25.193.256	133,333	97,84	0	0	4	25.193.256	133,33	97,84
2.02.01.05.07	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP Dengan Nilai A)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3	98.700.000	0		0	3	23.700.000	3	22.838.071	100	96,36	0	0	3	22.838.071	100,00	23,14
2.02.01.05.36	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12	245.000.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	3	75.000.000	0	75.000.000	0,00	30,61
2.02.01.05.85	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan SAKIP	9	75.000.000	0		0	0	0	0	-	0	0,00	4	35.000.000		35.000.000	0,00	46,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun ... (n-3)		Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)						Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020 (n-1)		Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020			
			Target		Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2019 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10= 5+7+9		11=10/4	
2.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan Keuangan yang diselesaikan	100	709.000.000	0	0	100	80.000.000	75	76.236.100	75	95,30	100		75	76.236.100	75,00	10,75
2.02.01.06.05	Rapat koordinasi teknis	Jumlah Rapat koordinasi yang diikuti	19	400.000.000	0	0	3	60.000.000	4	57.916.100	133,333	96,53	4	85.000.000	8	142.916.100	42,11	35,73
2.02.01.06.19	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun	5	40.000.000	0	0	1	0	1	-	100	0,00	1	10.000.000	2	10.000.000	40,00	25,00
2.02.01.06.22	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media KIE	3	199.000.000	0	0	1	20.000.000	5	18.320.000	500	91,60	2	20.000.000	5	38.320.000	166,67	19,26
2.02.01.06.22	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5	20.000.000	0	0	1	0	1	-	100	0,00	1	5.000.000		5.000.000	0,00	25,00
2.02.01.23	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterisian data terpilah dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	60,65	2.435.000.000	0	0	32,54	35.000.000	50,59	33.154.000	155,47	94,73	36,98		50,59	33.154.000	83,41	1,36
2.02.01.23	Pengumpulan dan Pengolahan Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen Gender dan Anak yang disusun	2	25.000.000	0	0	2	25.000.000	2	23.209.100	100	92,84			2	23.209.100	100,00	92,84
2.02.01.23.03	Pelaksanaan Pokja Data Gender dan Anak di Prov. Sumsel dalam rangka mendukung SIGA	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas Pokja Data Gender dan Anak di Prov. Sumsel																
2.02.01.23	Media Komunikasi dan Informasi Gender dan Anak	Jumlah Media Informasi Gender dan Anak	2	60.000.000	0	0	2	10.000.000	2	9.944.900	100	99,45			2	9.944.900	100,00	16,57
2.02.01.24	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan perlindungan perempuan	43,00	3.557.200.000	0	0	39,00	32.200.000	37,96	31.188.000	97,3333	96,86			38	31.188.000	88,28	0,88
2.02.01.24	Pembekalan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang diberi pembekalan pencegahan kekerasan perempuan dan anak	1350	267.200.000	0	0	100	17.200.000	100	16.688.000	100	97,02			100	16.688.000	7,41	6,25
2.02.01.24	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK PPD) Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah jenis kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan PIK PPD	3	515.000.000	0	0	3	15.000.000	3	14.500.000	100	96,67			3	14.500.000	100,00	2,82
2.02.01.25	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase peningkatan perlindungan khusus anak	18	4.485.000.000	0	0	10	269.660.000	24,71	256.209.000	247,1	95,01			25	256.209.000	137,28	5,71
2.02.01.25	Percontohan PATBM di Kab/Kota	Jumlah desa yang menjadi percontohan PATBM	17	518.800.000	0	0	17	156.550.000	17	155.760.000	100	99,50			17	155.760.000	100,00	30,02
2.02.01.25	Pendidikan Pencegahan Kekerasan bagi Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah peserta yang diberi pendidikan pencegahan kekerasan	8500	621.200.000	0	0	2000	41.200.000	2.000	37.699.000	100	91,50			2.000	37.699.000	23,53	6,07
2.02.01.25	Pelatihan fasilitator PATBM	Jumlah fasilitator PATBM yang dilatih	34	100.000.000	0	0	34	71.910.000	34	62.750.000	100	87,26			34	62.750.000	100,00	62,75

No	Sasaran	Permendagri 13 Tahun 2006		Kepmen 50 Tahun 2020		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		I	II		III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 8+14	16=15/7 x 100%	17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlayani	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100	12.681.811.000	100	4.188.720.550	100	9.028.536.000	147,9	1.535.004.981	385,8	2.361.926.439	76,53	2.258.835.140	100	2.107.997.734	100	8.263.764.294	100	124.524.848.44	100	98,19	Sekretariat
i		Program peningkatan kemampuan sistem pelaporan capaian kinerja yang meningkat/berk	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berk	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	5	90.000.000.000	2	7.883.000	1	10.000.000	1	858.000	1	784.600	1	7.500.000	1	9.962.600	1	19.105.200	3	26.988.200	60,0	29,9	

		aian kine rja dan keu ang an	emb ang		Eval uasi Kine rja Pera ngk at Daer ah																					
1	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yusu nan Lap oran Kine rja OP D	Jum lah lapo ran aku ntab ilitas kine rja yan g disu sun	Koordin asi dan Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa si Kinerja SKPD	Juml ah lapor an akun tabili tas kine rja yang disu sun	2 0	40. 000 .00 0	8	7.8 83. 000	4	10.0 00.0 00	3	858 .00 0	3	784 .60 0	4	7.5 00. 000	4	9.9 62. 600	4	19. 105 .20 0	1 2	26.9 88.2 00	6 0, 0 0	6 7, 4 7	Se kre tari at
i i		Prog ram Pela yan an Adm instr asi Perk	Pers enta se Pela yan an Adm instr asi	Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah	Jum lah Jeni s Kegi atan Adm inist rasi	1 2	48. 307 .66 2.8 30	8	12. 470 .31 9.1 80	4	6.87 8.95 6.00 0	4	1.3 61. 812 .60 7	4	2.0 03. 399 .30 5	4	1.4 84. 637 .91 7	4	1.5 79. 357 .36 0		6.4 29. 207 .18 9	8	18.8 99.5 26.3 69	6 6, 6 7	3 9, 1 2	

		anto ran	Perk anto ran yan g terla yani		Keu ang an Pera ngk at Daer ah																					
2	DPPP A Provin si Sumse l			Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Juml ah bula n gaji dan tunja ngan ASN yang diba yark an	6 0	45. 000 .00 0.0 00	2 4	11. 789 .95 9.1 80	1 2	6.06 7.14 6.00 0	3	1.2 98. 482 .60 7	6	1.7 71. 799 .30 5	9	1.3 13. 617 .91 7	1 2	1.2 93. 977 .36 0	1 2	5.6 77. 877 .18 9	3 6	17.4 67.8 36.3 69	6 0, 0 0	3 8, 8 2	Se kre tari at
3	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan jasa pen duk ung adm inistr asi	Jum lah tena ga hon or adm inistr asi kant	Penyedi aan Adminis trasi Pelaksa naan Tugas ASN	Juml ah tena ga hono r admi nistr asi kant	1 8	3.1 65. 862 .83 0	2 3	653 .60 0.0 00	2 4	693. 990. 000	2 4	52. 530 .00 0	2 4	213 .45 0.0 00	2 4	160 .92 0.0 00	2 4	214 .56 0.0 00	2 4	641 .46 0.0 00	2 4	1.29 5.06 0.00 0	1 3 3, 3 3	4 0, 9 1	Se kre tari at

[illegible]

i i i		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Aparatur yang meningkat Kapasi- tasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 0	835 .70 0.0 00	4	114 .42 7.8 59	3	200. 000. 000	3	440 .00 0	3	59. 470 .00 0	3	63. 245 .00 0	8 6	8.1 40. 609 .29 4	3	317 .38 6.6 95	7	431. 814. 554	7 0, 0 0	5 1, 6 7	
6	DPPPA Provinsi Sumsel	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang disediakan pakaian hari tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pegawai yang disediakan pakaian hari tertentu	2 4 0	275 .00 0.0 00	0	0	7 5	60.0 00.0 00	0	-	7 5	59. 250 .00 0	7 5	-	7 5	59. 250 .00 0	7 5	118 .50 0.0 00	7 5	118. 500. 000	3 1, 2 5	4 3, 0 9	Se- kretariat

	Sumse I	IP	pem bina an SAK IP	entasi Peratur an Perunda ng- Undang an	pem bina an SAKI P		0											5		5			6			
i v		Prog ram Peni ngk atan Sara na dan Pras aran a Apar atur	Pers enta se Sar ana dan Pras aran a Apar atur yan g Berf ung si Baik	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Jum lah Jeni s Kegi atan Adm inist rasi Umu m Pera ngk at Daer ah	7	4.1 88. 800 .00 0	7	1.1 69. 621 .16 4	7	879. 180. 000	5	103 .56 4.0 00	5	163 .97 4.9 86	6	295 .23 8.4 00	6	228 .47 3.0 00	6	791 .25 0.3 86	7	2.71 2.73 3.31 4	1 0 0, 0 0	6 4, 7 6	
9	DPPP A Provin si Sumse I	Pen yedi aan Kom pon en Inst	Jum lah jenis kom pon en inst	Penyedi aan Kompon en Instalasi Listrik/P enerang	Juml ah jenis kom pone n insta	6 0	70. 000 .00 0	1 8	19. 935 .00 0	1 2	20.0 00.0 00	4	4.0 00. 000	1 2	5.9 50. 000	7	-	7	10. 050 .00 0	3 0	20. 000 .00 0	4 8	39.9 35.0 00	8 0, 0 0	5 7, 0 5	Se kre tari at

		alasi listrik/pe neran gan ban gun an kant or	alasi listrik/pe neran gan ban gun an kant or yan g dise diak an	an Bangun an Kantor	lasi listrik /pen eran gan bang unan kant or yang dise diak an																					
1 0	DPPP A Provin si Sumse l	Pen gad aan pera lata n dan perl eng kap an kant or	Jum lah pera lata n dan perl eng kap an kant or yan g dise	Penyedi aan Peralata n dan Perleng kapan Kantor	Juml ah peral atan dan perle ngka pan kant or yang dise diak an	4 0	695 .00 0.0 00	2 5	239 .44 5.0 00	1 3	164. 000. 000	0	-	0	-	1 3	163 .50 0.0 00	1 3	-	2 6	163 .50 0.0 00	5 1	402. 945. 000	1 2 7, 5 0	5 7, 9 8	Se kre tari at

[illegible]

			han kant or yan g dise diak an		rsiha n kant or yang dise diak an																					
		Pen yedi aan alat tulis kant or	Jum lah Jeni s pen yedi aan alat tulis kant or		2.Ju mlah jenis peny edia an alat tulis kant or	2 0 0	900 .00 0.0 00	9 2	214 .02 2.5 00	4 0	117. 368. 500	4 0	29. 350 .00 0	4 0	29. 310 .00 0	4 0	29. 459 .50 0	4 0	26. 000 .00 0	3 9	114 .11 9.5 00	1 3 1	328. 142. 000	6 5, 5 0	3 6, 4 6	
1 2	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan bara ng ceta kan dan pen gga nda an	Jum lah jenis pen ceta kan dan pen gga nda an	Penyedi aan Barang Cetakan dan Pengga ndaan	Juml ah jenis penc etak an dan peng gand aan	7 5	400 .00 0.0 00	4 4	98. 379 .40 0	1 2	53.0 00.0 00	7	12. 884 .00 0	1 2	12. 995 .00 0	1 3	11. 977 .40 0	1 5	14. 549 .00 0	1 3	52. 405 .40 0	5 7	150. 784. 800	7 6, 0 0	3 7, 7 0	Se kre tari at

13	DPPP A Provinsi Sumse l	Pen yedi aan bah an bac aan dan pera tura n und ang- und ang	Jum lah bah an bac aan dan pera tura n und ang- und ang dan maj alah yan g dibe li	Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perunda ng- undang an	Juml ah baha n baca an dan perat uran unda ng- unda ng dan maja lah yang dibe li	12	50.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0,000	0,000	Se kre tari at
14	DPPP A Provinsi Sumse l, Stakeh oders	Pen yedi aan Mak an dan Min um	Jum lah rapa t yan g dise diak an mak	Fasilitas i Kunjung an Tamu	Juml ah rapat yang dise diak an mak anan dan	140	123.800.000	65	60.000.000	50	42.380.000	5	8.000.000	21	6.775.000	25	13.425.000	14.056.000	51	42.256.000	116	102.256.000	82,86	82,60	Se kre tari at

[illegible]

		OP D	ti																							
		Rap at- Rap at Koor dina si dan kons ultas i ke dala m, luar daer ah	Jum lah pela ksa naa n koo r dina si kon sult asi ked ala m dan kelu ar daer ah		2. Juml ah pela ksan aan koo r dina si kons ultas i keda lam dan kelu ar daer ah	2 1 0	1.1 50. 000 .00 0	1 2 6	299 .74 7.1 51	5 6		0		1 2	- 0	5 0	-		-	6 2	-	1 8 8	299. 747. 151	8 9, 5 2	2 6, 0 6	
v		Prog ram Pela yan an Adm instr asi Perk	Pers enta se Pela yan an Adm instr asi	Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jum lah Jeni s Kegi atan Pen yedi aan	4	1.5 55. 298 .17 0	4	391 .41 3.7 27	4	370. 400. 000	3	85. 674 .07 4	4	70. 876 .23 3	4	72. 305 .59 5	5 2 2	130 .04 6.0 29	4	358 .90 1.9 31	4	784. 555. 658	1 0 0, 0 0 0	5 0, 4 4	

		an to ran	Perk anto ran yan g terla yani		Jasa Pen unja ng Urus an Pem erint ah Daer ah																					
1 6	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan Jasa Sura t Men yura t	Jum lah ben da pos dan pen giri man sura t	Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Juml ah surat men yurat dan bend a pos yang dibel i	1 8 0 0	32. 000 .00 0	3 8 7	2.3 08. 500	5 5 0	5.40 0.00 0	0	-	2 9 4	2.9 29. 000	3 7 9	271 .00 0	5 0 9	2.2 00. 000	5 0 9	5.4 00. 000	8 9 6	7.70 8.50 0	4 9, 7 8	2 4, 0 9	Se kre tari at
1 7	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan jasa kom unik asi sum	Jum lah jenis telp on, listri k, air	Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan	Juml ah jenis telpo n, listrik , air, dan	3 6	1.1 50. 000 .00 0	1 1	281 .24 5.2 27	7	198. 000. 000	4	60. 819 .07 4	7	43. 457 .23 3	7	45. 434 .59 5	9	44. 681 .02 9	7	194 .39 1.9 31	1 8	475. 637. 158	5 0, 0 0	4 1, 3 6	Se kre tari at

		ber day a air dan listrik	dan inter net yan g diba yar	Listrik	inter net yang diba yar																					
1 8	DPPP A Provin si Sumse l	Pem eliha raan rutin perl eng kap an ged ung kant or	Jum lah perl eng kap an ged ung kant or yan g dipe lihar a	Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor	Juml ah perle ngka pan gedu ng kant or yang dipel ihara	1 9	119 .69 8.1 70	5	73. 620 .00 0	1 3	50.0 00.0 00	4	13. 455 .00 0	4	9.7 90. 000	4	15. 200 .00 0	4	11. 215 .00 0	4	49. 660 .00 0	9	123. 280. 000	4 7, 3 7	1 0 2, 9 9	Se kre tari at
1 9	DPPP A Provin si Sumse l			Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Juml ah Jasa Tena ga Pela yana n Umu	9	253 600 000	1 1	342 400 00	2	117. 000. 000	1	11. 400 .00 0	2	14. 700 .00 0	2	11. 400 .00 0		71. 950 .00 0	2	109 .45 0.0 00	1 3	143. 690. 000	1 4 4, 4 4	5 6, 6 6	Se kre tari at

				m Kant or																					
	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan Jasa Keb ersi han Kant or	Jum lah jenis alat dan bah an keb ersi han kant or yan g dise diak an	1.Ju mlah jasa kebe rsiha n kant or yang diba yark an,	9	-	3	0	2		2		2	-	2	-		-	2		5		5 5, 5 6	# D I V /0 !	Se kre tari at
	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan jasa tutor SKJ	Jum lah tent or SKJ yan g dibe ri hono r	2. Jum lah tentor SKJ yang diber i hono r	5	54. 600 .00 0	1	2.4 00. 000	-	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-	1	2.40 0.00 0	2 0, 0 0	4, 4 0	Se kre tari at

	DPPPA Provinsi Sumsel, Masyarakat	Komunikasi, Informatika dan Pendidikan (KIE)	Jumlah media KIE		3. Jumlah media KIE	13	199.000.00	7	31.840.00	1		0		0	-	2	-		-	2	-	9	31.840.00	69,23	16,00	Se kretariat
v i		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	4	1.379.800.00	4	431.622.31	4	690.000.000	4	21.996.300	4	104.701.315	4	378.186.28	4	136.024.50	4	640.908.493	4	1.072.530.724	10,73	7,73	

					ah Daer ah																					
20	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan jasa pem eliha raan dan peri zina n ken dara an dina s/op eras ional	Jum lah ken dara an dina s/op eras ional	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan dan Pajak Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	Juml ah kend araa n dina s/op erasi onal	7 3	892 .80 0.0 00	2 7	289 .29 7.2 31	1 7	275. 000. 000	1 7	19. 096 .30 0	1 7	79. 980 .31 5	1 7	45. 065 .17 8	1 7	89. 702 .54 7	6 8	233 .84 4.3 40	9 5	523. 141. 571	1 3 0, 1 4	5 8, 6 0	
21	DPPP A Provin si Sumse l	Pen yedi aan jasa perb aika n	Jum lah perb aika n pera lata	Pemelih araan Peralata n dan Mesin Lainnya	Juml ah Perb aika n peral atan	2 3	67. 000 .00 0	6	14. 800 .00 0	5	15.0 00.0 00	1	2.9 00. 000	3	900 .00 0	4	900 .00 0	5	8.1 00. 000	5	12. 800 .00 0	1 1	27.6 00.0 00	4 7, 8 3	4 1, 1 9	Se kre tari at

[illegible]

[illegible]

				Kewenangan Provinsi	sutama n Gender (PUG)																					
24	Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/kota, Focal Point OPD	Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender di Prov. Sum	Jumlah jenis kegiatan pokja PUG yg difasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis kegiatan pokja PUG yang difasilitasi	13	325.000.00	5	76.288.560	5	375.000.000	1	17.744.500	2	43.443.800	2	69.085.000	9	234.619.698	9	364.892.998	14	441.181.558	107,69	135,75	Bidang PUG PP

[illegible]

[illegible]

				i Kewena ngan Provinsi	a indu stri ruma han yang dilati h dan diber ikan bant uan																					
2 6	Perem puan dari keluarg a Miskin pada Kabup aten/K ota dan desa/k elurah an sesuai aplikas i si Gertak	Pen gem ban gan Mod el Des a PRI MA yan g dibe ntuk	Jum lah Mod el Des a PRI MA yan g dibe ntuk		1. Juml ah Mod el Des a PRI MA yang dibe ntuk.	4 0	1.2 00. 000 .00 0	9	256 .42 8.5 00	1 0	300. 000. 000	0	-	1	-	1	-	1 0		1 0	285 .53 9.0 00	1 9	541. 967. 500	4 7, 5 0	4 5, 1 6	Bid an g PU G PP

		(PRI MA)																								
	Perem puan yang memul ai usahan atau memili ki usaha kecil	Pen gem ban gan Eko nom i Pere mpu an Mel alui Indu stri Rum aha n	Jum lah pere mpu an usa ha indu stri rum aha n yan g dilati h dan dibe rika n bant uan		2. Juml ah pere mpu an usah a indu stri ruma han yang dilati h dan diber ikan bant uan	2 0 0	225 .00 0.0 00	0	0	1 0 0	259. 394. 000	0	-	0	-	0	-	6 8		6 8	167 .56 4.0 00	6 8	167. 564. 000	3 4, 0 0	7 4, 4 7	Bid an g PU G PP
i i i				Pengua tan dan Penge mbang an Lemba	Jum lah Jeni s Lem bag	1 0	5.8 00. 000 .00 0	4	1.6 60. 494 .56 6	2	1.02 0.00 0.00 0	2	20. 618 .00 0	2	136 .37 4.4 00	2	102 .38 5.7 66	2	464 .02 7.8 19	2	723 .40 5.9 85	6	2.38 3.90 0.55 1	6 0, 0 0	4 1, 1 0	

				ga Penyed ia Layana n Pember dayaan Peremp uan Kewena ngan Provins i	a Pen guat an dan Pen gem ban gan Lem bag a Pen yedi a Laya nan yan g di Fasil itasi																					
27				Advoka si Kebijak an dan Pendamb pungan kepada Lembag a Penyedi	Juml ah jenis kegi atan peni ngka tan kuali tas	159	58000000	55	1660494566	21	1.020.000.000	3	20.618.000	8	136.374.400	17	102.385.766	24	464.027.819	24	723.405.985	79	2.383.900.551	49,69	41,10	

[illegible]

		a Wan ita Pers atua n) Prov insi Sum sel	nga n pere mpu an dan ana k Dha rma Wan ita	ndun gan pere mpu an dan anak Dhar ma Wani ta.																				
	Organi sasi Perem puan anggot a DW, Masyar akat (Perem puan)	Peni ngk atan Kap asita s Kele mba gaa n Org anis asi Wan ita BKO W Prov insi	Jum lah jenis kegi atan peni ngk atan kuali tas hidu p, perli ndun nga n pere mpu an	2.Ju mlah jenis kegi atan peni ngka tan kuali tas hidu p, perli ndun gan pere mpu an dan	7 4	2.5 00. 000 .00 0	2 3	675 .38 3.3 50	8	320. 000. 000	1		4	-	5	-	1 0	282 .08 3.8 66	1 0		3 3	675. 383. 350	4 4, 5 9	2 7, 0 2

[illegible]

				Lingku p Daerah Provins i dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kot a	Pere mpu an																					
2 8	OPD/L embag a penyed ia layana n perlind ungan perem puan	Sine rgi lem bag a laya nan pere mpu an dan ana k	juml ah jenis kegi atan lem bag a laya nan pere mpu an yan g bers iner gi	Koordin asi dan Sinkroni sasi Pelaksa naan Kebijak an, Progra m dan Kegiata n Penceg ahan Kekeras an terhada p Peremp uan Kewena	Juml ah jenis kegi atan koor dina si sindr onis asi penc egah an keke rasa n	6	100 .00 0.0 00	0	0	2	36.8 44.0 00			0	-	2	-		13. 265 .05 0	2	13. 265 .05 0	2	13.2 65.0 50	3 3, 3 3	1 3, 2 7	Bid an g PP A

				ngan Provinsi																							
29	Masyarakat yang rentan KDRT dan TPPO	Optimalisasi Pencegahan KDR T dan TPP O	Jumlah peserta Peni ngkatan Pem aha man Pen ceg aha n kek eras an	Advoka si Kebijakan dan Pendam pingan Layana n Perlindu ngan Peremp uan Kewena ngan Provinsi	Juml ah pese rta peni ngka tan pem aha man penc egah an keke rasa n	1700	350.000.000	0	0	100	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0,000	0,000	Bidang PP A		
i i		Program Peni ngkatan Pelayan an Perli ndu nga	Pers entase kas us kek eras an pere mpu an	Penyed iaan Layana n Rujuka n Lanjuta n bagi Peremp uan Korban	Pers entase Kas us Kek eras an Pere mpu an	100	1.310.000.000	100	350.574.800	100	178.183.000,00	100		100	1.140.000	100		100	13.735.524	100	14.875.524	100	365.450.324	100	27,900		

		n Pere mpu an dan Ana k	dan ana k yan g dita nga ni	Kekera san yang memerl ukan Koordin asi Tingkat Daerah Provins i dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kot a	yan g dita nga ni																					
3 0	OPD/L embag a penyed ia layana n perlind ungan perem puan , Perem puan Korban Kekera	Pen yedi aan laya nan pen gad uan mas yara kat bagi pere mpu an	Jum lah kas us kek eras an pere mpu an dan ana k yan g	Penyedi aan Layana n Pengad uan Masyar akat bagi Peremp uan Korban Kekeras an Tingkat	Juml ah kasu s keke rasa n pere mpu an yang ditan gani	3 5 0	655 .00 0.0 00	5 6	175 .28 7.4 00	3 0	15.0 00.0 00	6	-	1 1	1.1 40. 000	1 3	-	1 3	13. 735 .52 4	4 3	14. 875 .52 4	9 9	190. 162. 924	2 8, 2 9	2 9, 0 3	UP D PP A

	san	korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	ditan ni	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																					
31	OPD/L embaga penyedia layanan perlindungan perempuan ,	Pelayan an Penangan ana n Kasus Kekeras	Jumlah laporan Kasus Kekeras an Peremp	Koordin asi dan Sinkroni sasi Pelaksa naan Penyedia aan Layanan Rujukan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	5	655 .00 0.0 00	2	175 .28 7.4 00	1	163. 183. 000	0	-	1	-	1	-	-	1	-	3	175. 287. 400	6 0, 0 0	2 6, 7 6	UP D PP A (D AK)

	Perempuan Korban Kekerasan	an Pere mpu an dan Anak	uan dan Anak yang dita ngani	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	penyediaan an rujukan																					
i i i				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan	1 0	2.7 40. 000 .00 0	1	14. 500 .00 0	3	335. 715. 000, 00	0		2	44. 064 .30 0	3	44. 385 .00 0	3	181 .29 8.0 00	3	269 .74 7.3 00	4	284. 247. 300	4 0, 0 0	1 0, 3 7	

					Perli ndu nga n Pere mpu an Kor ban Kek eras an																					
3 2	Perem puan penyan dang disabili tas	Peni ngk atan Kap asita s Kele mba gaa n Pus at Infor masi Kon sulta si Pere mpu	Jum lah jenis kegi atan PIK PPD yan g difa silita si	Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Lembag a Penyedi a Layana n Penang anan bagi Peremp uan Korban Kekeras	Juml ah jenis kegi atan PIK PPD yang difas ilitasi / Juml ah Jeni s Peni ngka tan Kap	1 1	515 .00 0.0 00	3	14. 500 .00 0	3	162. 715. 000	0	-	1	13. 842 .50 0	2	27. 135 .00 0	2	71. 138 .00 0	2	112 .11 5.5 00	5	126. 615. 500	4 5, 4 5	2 4, 5 9	Bid an g PP A

		an Pen- yan- dan- g Disa- bilita- s (PIK- PPD) Provinsi Sumatera Selatan		an Kewenaa- ngan Provinsi	asita- s bagi Pendamping Layanan Pere-mpu-an																					
33	Lemba- ga/ Ormas/ Organi- sasi Perem-puan/Tokoh Agama /Tokoh Masyar-akat/			Penguat- an Jejaring antar Lembag-a Penyedi-a LAYANA n Perlindu-ngan	Jumlah jenis kegi-at- an peng-uata-n jejari-ng perli-ndun-	19	222500000	2	0	5	173.000.000	0	-	1	30.221.800	1	17.250.000	2	110.160.000	2	157.631.800	4	157.631.800	21,05	7,08	Bidan-g PPA

[illegible]

				GKATA N KUALIT AS KELUA RGA	Kab upat en/K ota yan g mela ksan akan peni ngk atan Keta han an Kelu arga	1 8	000 .00 0	6 5	00	, 6 5	000	6 5		6 5	600	6 5	.40 0	6 5	.50 0	6 5	.50 0	3	500	2	4	
i				Pengua tan dan Penge mbang an Lemba ga Penyed ia Layana n Pening katan Kualita	Jum lah jenis kegi atan peni ngk atan kuali tas kelu arga dala m	5	550 .00 0.0 00	1	2.9 16. 000	1	100. 000. 000, 00				23. 480 .00 0		19. 100 .00 0		28. 440 .50 0	1	71. 020 .50 0	2	73.9 36.5 00	4 0, 0 0	1 3, 4 4	

				s Keluarg a dalam Mewuju dkan KG dan Hak Anak Kewena ngan Provins i	mew ujud kan Kes etar aan Gen der (KG) dan Hak Ana k																					
3 4	Lemba ga penyed ia layana n keluarg a, organis asi masyar akat, organis asi perem puan , masyar akat	Pela ksan aan Peni ngk atan Pemb an gun an Kual itas Kelu arga	Jum lah jenis kegi atan peni ngk atan keta han an kelu arga	Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Lembag a Penyedi a Layana n Peningk atan Kualitas Keluarg a Kewena	Juml ah jenis kegi atan peni ngka tan keta hana n kelu arga	1 7	550 .00 0.0 00	1	2.9 16. 000	1	100. 000. 000	0	-	1	23. 480 .00 0	1	19. 100 .00 0	1	28. 440 .50 0	3	71. 020 .50 0	4	73.9 36.5 00	2 3, 5 3	1 3, 4 4	Bid an g PU G PP

				ngan Provinsi																						
V				PROGR AM PENG LOLAAN SISTEM DATA GENDE R DAN ANAK	Pers enta se kete risia n data terpi lah pad a Sist em Infor masi Gen der dan Ana k (SIG A)	60 , 65	2.4 35. 000 .00 0	50 , 59	96. 887 .40 0	41 , 42	40.0 00.0 00,0 0	50 , 59	2.7 47. 585	50 , 59	22. 827 .00 0	50 , 59	8.8 33. 100		97. 913 .86 7	50 , 59	132 .62 1.5 52	50 , 59	229. 508. 952	83, 41	9, 43	
i				Pengu mpulan , Pengol ahan Analisi	Jum lah jenis kegi atan Pen	15	1.3 10. 000 .00 0	5	73. 478 .30 0	2	40.0 00.0 00,0 0	1		2		2	-	2	132 .62 1.5 52	2	132 .62 1.5 52	7	206. 099. 852	46, 67	15, 73	

				s dan Penyaji an Data Gender dan Anak dalam Kelemb agaan Data di Tingkat Daerah Provins i	gum pula n, Pen gola han Anal isis dan Pen yajia n Data Gen der dan Ana k dala m Kele mba gaa n Data																					
35				Penyedi aan Data Gender dan Anak	Jum lah jenis Kegi atan pen	4	1.050.000.000	3	33.716.000	4	95.000.000	1	998.985	1	14.917.000	3	7.345.600	4	69.457.350	4	92.718.935	7	126.434.935	175.000	12.040	

				Provinsi	gum pula n pen gelo laan data gen der dan anak																					
K/L/OP D terkait	Pela ksan aan Pokj a Data Gen der dan Ana k di Prov . Sum sel dala m rang ka men	Jum lah jenis Kegi atan Fasi litasi Pokj a Dat a Gen der dan Ana k di Prov . Sum sel			1. Juml ah jenis kegi atan Fasil itasi Pokj a Data Gen der dan Anak di Prov . Sum sel.	1 2	590 .00 0.0 00	2	33. 316 .00 0	3		1		1		2			-	3		5	33.3 16.0 00	4 1, 6 7	5, 6 5	Bid an g Da ta

[illegible]

V				PROGR AM PEMEN UHAN HAK ANAK (PHA)	Pers enta se Kab upat en/K ota yan g mela kuka n upa ya peni ngk atan pem enu han hak anak	1 0	4.7 70. 000 .00 0	1 0	384 .29 4.6 50	8 2 , 3 5	426. 310. 000	1 0	22. 476 .00 0	1 0 0	85. 258 .30 0	1 0 0	16. 175 .00 0	3	107 .54 9.1 00	1 0 0	231 .45 8.4 00	1 0	615. 753. 050	1 0 0,0 0	1 2, 9 1	
i				Peleb agaan PHA pada Lemba ga Pemer intah, Non	Jum lah jenis Pele mba gaa n PHA pad	1 0	1.4 10. 000 .00 0	4	176 .77 9.6 00	2	246. 310. 000	1 0 0	22. 476 .00 0	2 0 0	85. 258 .30 0	2 0 0	9.3 50. 000	2 0 0	89. 355 .10 0	2 0 0	206 .43 9.4 00	6	383. 219. 000	6 0, 0 0	2 7, 1 8	

				Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	a Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha																					
37	Gt KLA Prov/Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi KLA Provinsi Sumsel	Jumlah kab/kota yang dievaluasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerin	Juml ah kab/ kota yang di Eval uasi	17	960.0000	15	150.279.600	17	186.310.000	3	22.476.000	9	66.597.000	9	9.350.000	17	54.904.700	17	153.327.700	17	303.607.300	100,000	31,63	Bidang TK A

				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup																					
39	Forum Anak, serta Anak-anak di Sumse	Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pem	Jumlah jenis kegiatan peningkatan partisipasi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Jumlah jenis kegiatan peningkatan Partisipasi	15	1.17.000.000	5	160.010.200	3	180.000.000	0	-	0	-	1	6.825.000	4	18.194.000	4	25.019.000	9	185.029.200	60.000	16.56	Bidang TK A

					k																					
i				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan kekerasan terhadap anak	10	180.000.000	2	23.700.000	1	17.546.000	0	0	1	0	1	0	0	14.538.000	1	14.538.000	3	38.238.000	30,000	21,24	
40	OPD/Lembaga penyedia layanan perlindungan	Literasi Perlingkungan Khusus	jumlah/kota diberik liter	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan	Jumlah Jenis Media Pencegah	10	180.000.000	2	23.700.000	1	17.546.000	0	-	1	-	1	-	-	14.538.000	1	14.538.000	3	38.238.000	30,000	21,24	Bidang PPA

	ungan anak , Anak anak di sumsel	Ana k	asi perli ndu nga n khu sus ana k	terhada p Anak Kewena ngan Provinsi	an Keke rasa n Anak																					
i i				Penyed iaan Layana n bagi Anak yang Memerl ukan Perlind ungan Khusus yang Memerl ukan Koordin asi Tingkat Daerah Provins i	Jum lah Jeni s Pen yedi aan Laya nan bagi Ana k yan g Mem erlu kan Perli ndu nga n Khu	1 0	1.5 60. 000 .00 0	2	350 .57 4.8 00	3	256. 603. 000, 00	2 , 0 0	-	3 , 0 0	15. 180 .00 0,0 0	3 , 0 0	1.1 40. 000 ,00	5 1 , 0 0	73. 857 .50 0	3 , 0 0	67. 187 .50 0,0 0	5	417. 762. 300, 00	5 0, 0 0	2 6, 7 8	

					SUS																					
41	OPD/L embaga penyedia layanan perlindungan anak , Anak Korban Kekerasan	Penyediaan layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani	350	655.000.000	56	175.287.400	45	20.000.000	5	-	26	15.180.000.000	38	1.140.000	49	1.520.000	49	17.840.000	105	193.127.400	30,000	29,49	UP TD PPA

4 2	OPD/L embaga penyedia layanan perlindungan anak , Anak anak di sumsel	Pen gem ban gan kom unik asi, infor masi dan edu kasi ana k yan g me merl uka n perli ndu nga n khus us kew ena nga n prov	Jum lah jenis media KIE	Pengem bangan Komuni kasi, Informa si, Edukasi Anak yang Memerl ukan Perlindu ngan Khusus Kewena ngan Provinsi	Juml ah jenis media KIE	6	250 .00 0.0 00	1	0	1	166. 603. 000	0	-	0	-	0	-	2	46. 797 .50 0	2	46. 797 .50 0	3	46.7 97.5 00	5 0, 0 0	1 8, 7 2	UP TD PP A
--------	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	---	------------------------	---	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

		insi																								
43	OPD/Lembaga penyedia layanan perlindungan anak, Anak Korban Kekerasan	Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah laporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan anak	5	655.000.000	2	175.287.400	1	70.000.000	0	-	1	-	1	-		2.550.000	2	2.550.000	4	177.837.400	80,000	27,15	UP TD PPA
iii				Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah Jenis Penguatan	10	5.980.000.000	4	1.843.540.600	2	622.915.000.000	10	64.950.000.000	10	77.933.475,00	20	1.167.500,00	40	210.598.125	20	354.649.100	6	1.276.419.400	60,000	21,34	

				Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus																						
44	Lemba ga/Or mas/Or ganisa			Koordin asi dan Sinkroni sasi	Juml ah Jeni s	10	2.990.000	4	921.770.3	3	622.915.000	1	64.950.00	1	77.933.47	1	1.167.500	4	210.598.1	4	354.649.1	8	1.276.419.40	80,0	2,069	Bidan g PP	

	si layana n Anak/T okoh Agama /Tokoh Masyar akat/ Masyar akat			Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Lembag a Penyedi a Layana n Anak yang Memerl ukan Perlindu	Kegi atan Peni ngka tan Kap asita s Lem baga Perli ndun gan Khus us Anak		.00 0		00				0		5				25		00		0			A
	Lemba ga/Or mas/Or ganisa si layana n Anak/T okoh Agama /Tokoh Masyar akat/ Masyar akat	Peni ngk atan Kap asita s Perli ndu nga n Ana k Terp adu Berb	Jum lah kad er PAT BM yan g dilati h	ngan Khusus Kewena ngan Provinsi	1. Juml ah Kad er PAT BM yang dilati h	3 4 0 0	1.2 50. 000 .00 0	6 3 0	0	8 5 0	-								3 0 0	-	6 3 0	-	1 8, 5 3	0, 0 0	Bid an g PP A	

		asis Mas yara kat (PA TBM)																					
	Lemba ga/Or mas/Or ganisa si layana n Anak/T okoh Agama /Tokoh Masyar akat/ Masyar akat	Perc onto han PAT BM di kab/ kota	Jum lah des a/ke lura han yan g men jadi perc onto han PAT BM	Juml ah desa /kelu raha n yang menj adi perc onto han PAT BM	3 4	518 .80 0.0 00	3 2	290 .59 8.0 00	0								0	-	3 2	290. 598. 000	9 4, 1 2	5 6, 0 1	Bid an g PP A
	Lemba ga/Or mas/Or ganisa si layana n Anak/T okoh	Pela tiha n Fasil itator PAT BM Perli ndu nga	Jum lah fasili tator PAT BM yan g dilati h	Juml ah fasilit ator PAT BM yang dilati h	3 4	100 .00 0.0 00	3 4	62. 750 .00 0	0								0	-	3 4	62.7 50.0 00	1 0 0, 0 0	6 2, 7 5	Bid an g PP A

	Agama /Tokoh Masyarakat/ Masyarakat	n Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	h																				
	KPAD Provinsi, Lembaga terkait anak, anak korban kekerasan	Penguatan Kelembagaan KPAD Provinsi Sumsel	Jumlah jenis kegiatan KPAD	2. Jumlah jenis kegiatan KPAD	17	500.0000	8	530.723.300	2								2	-	10	530.723.300	58,82	106,14	Bidang PPA
	Lemba ga yang menan gani	Pen didik an Pen ceg	Jum lah pes erta yan	3. Jumlah pese rta	8500	621.2000	2	37.699.000	50								200	-	2200	37.699.000	25,88	6,07	Bidang PPA

ABK, Penda mping ABK dan ABK	aha n Kek eras an bagi Ana k dan Ana k Berk ebut uha n Khu sus	g dibe ri pen didik an pen ceg aha n kek eras an			yang diber i pend idika n penc egah an keke rasa n																										
											13.4 97.0 46.0 00		1.6 63. 541 .06 6		2.7 91. 368 .39 4		2.6 61. 105 .60 6		4.0 68. 470 .51 7		11. 447 .33 4.5 83										
Rata-rata capaian kinerja (%)																								6 8, 6 9							
Predikat kinerja																										re n d					

													a h		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025	Stakeholder Terkait
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,00	93,25	93,30	DPPPA
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,00	76,58	75,50	DPPPA
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,00	62,01	64,00	DPPPA
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	22,00	42,08	24,00	DPPPA
5	Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non pemerintah)				
6	Persentase perempuan pada jabatan struktural				
7	Tingkat				

Partisipasi Angka Kerja Perempuan	
8	Keterlibatan perempuan di Parlemen
9	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per 10.000 Perempuan Termasuk TPPO
10	kekerasan terhadap anak per 10.000 anak
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
12	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, maka penyusunan Rencana Kerja perlu dilakukan secara matang, sehingga perlu memperhatikan isu-isu strategis. Adapun isu- isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Dalam berbagai bidang seperti politik, pengambilan keputusan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan kualitas hidup perempuan masih belum optimal.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak

Pemenuhan hak anak dilakukan melalui penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Capaian 2022 sudah 14 kabupaten/kota yang meraih KLA

3. Belum optimalnya perlindungan perempuan

Masih adanya kasus kekerasan maupun pelanggaran terhadap hak perempuan. Rasio perempuan korban kekerasan (per 100.000) tahun 2021 sebesar 7.11

4. Belum optimalnya pemenuhan Perlindungan Khusus anak

Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kasus pelecehan seksual, kasus bullying. Rasio anak korban kekerasan (per 10.000) tahun 2021 sebesar 0,71

5. Belum optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah

Penerapan Reformasi Birokrasi serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal. Data nilai SAKIP DPPPA Tahun 2021 yaitu BB atau 78,74

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasar pada rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, adalah dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN				LOKASI KEGIATAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	OUTCAM KEGIATAN	TARGET	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Tersediannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Palembang
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	Kota Palembang

				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	Kota Palembang
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palembang
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Palembang
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Kota Palembang

				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	100%	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Meningkatnya kompetensi ASN	10 Orang	Provinsi dan Luar Provinsi Sumsel
2.08.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Meningkatnya kompetensi ASN	50 Orang	Kota Palembang
2.08.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Meningkatnya kompetensi ASN	6 Orang	Provinsi dan Luar Provinsi Sumsel
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	Provinsi Sumsel

2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Kota Palembang
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Kota Palembang
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Kota Palembang
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	8 Paket	Kota Palembang
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	Kota Palembang
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	Kota Palembang

				Perundang-Undangan yang Disediakan		Peraturan Perundang-Undangan		
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palembang
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Provinsi dan Luar Provinsi Sumsel
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Palembang
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Terlaksananya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Palembang
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	Kota Palembang

				Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Daya Air dan Listrik		
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Kota Palembang
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Kota Palembang
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara	100%	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara	100%	Provinsi Sumsel
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkannya Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Prov. Sumsel
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	Kota Palembang
2.08.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang	1 Website	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	1 Website	Kota Palembang

				Dipelihara				
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1 Gedung	Kota Palembang
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada BL APBD	,60,00 %		60,00 %		60,00 %	Prov. Sumsel
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang melaksanakan PPRG.	75,38%	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang melaksanakan PPRG.	75,38%	Prov. Sumsel
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersdianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel

2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	66 Orang	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	66 Orang	Prov. Sumsel
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			Jumlah Jenis kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	4 Jenis	Jumlah Jenis kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	4 Jenis	Prov. Sumsel
2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	1 Dokumen	Prov. Sumsel

				Kewenangan Provinsi		Ekonomi Kewenangan Provinsi		
2.08.02.1.02.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	10 Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	10 Organisasi	Prov. Sumsel
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah lembaga layanan perempuan yang dilakukan penguatan dan pengembangan	45 Lembaga	Jumlah lembaga layanan perempuan yang dilakukan penguatan dan pengembangan	45 Lembaga	Prov. Sumsel
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	45 Lembaga	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	45 Lembaga	Prov. Sumsel

	Provinsi			Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Meningkatnya Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Prov. Sumsel
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Hari Kartini)			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.8.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000	11,25 %		11,25 %		11,25 %	Prov. Sumsel

		penduduk perempuan						
2.08.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Jenis Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1	Jumlah Jenis Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1	Prov. Sumsel
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.08.03.1.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100%	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100%	Prov. Sumsel

2.08.03.1.02.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	100 Orang Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	100 Orang Perempuan	Prov. Sumsel
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30 Kasus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30 Kasus	Prov. Sumsel
2.08.03.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Meningkatnya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya	25 Lembaga	Meningkatnya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya	25 Lembaga	Prov. Sumsel

2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah sumber daya lembaga layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	18 Orang	Meningkatnya sumber daya lembaga layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	18 Orang	Kota Palembang
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya dokumen hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Palembang
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indek Perlindungan Anak			68,00 %		68,00 %	Prov. Sumsel
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak			Jumlah Media KIE Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Media	Jumlah Media KIE Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Media	Prov. Sumsel

	Kewenangan Provinsi.							
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak Anak	1 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak Anak	1 Jenis	Prov. Sumsel
2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Meningkatnya Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Prov. Sumsel

2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan keluarga	5 Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan keluarga	5 Kab/Kota	Prov. Sumsel
2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	Meningkatnya Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	Prov. Sumsel
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	60,00 %		60,00 %		60,00 %	Prov. Sumsel
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender	60,65%	Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender	60,65%	Prov. Sumsel

				dan Anak (SIGA)		dan Anak (SIGA)		
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Tersdianya Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Perlindungan Anak	68,00 %		68,00 %		68,00 %	Prov. Sumsel
2.08.06.1.01	Pelemabagaan PHA pada Lemabaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	17 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	17 Organisasi	Prov. Sumsel

				Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
2.08.06.1.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Lembaga	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Lembaga	Prov. Sumsel
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	OKI, OI, OKU Selatan, Empat Lawang, OKU, Lahat, Prabumulih Pagar Alam dan Luar

								Provinsi
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lemabaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.	80 Lembaga	Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.	80 Lembaga	Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Provinsi
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Provinsi
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1,15%		1,15%		1,15%	Prov. Sumsel

2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Peserta Pencegahan kekerasan Anak	200 Peserta	Jumlah Peserta Pencegahan kekerasan Anak	200 Peserta	Prov. Sumsel
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	17 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	17 Organisasi	Prov. Sumsel
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersdianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel
2.08.07.1.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat			Persentase anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100%	Persentase anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	100%	Prov. Sumsel

	daerah provinsi							
2.08.07.1.02.01	Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Anak	Prov. Sumsel
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30 Kasus	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30 Kasus	Prov. Sumsel
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tersdianya Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Prov. Sumsel

2.08.07.1.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang bersinergi	3 Lembaga	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang bersinergi	3 Lembaga	Prov. Sumsel
2.08.07.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Prov. Sumsel
JUMLAH.....								

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas Perangkat Daerah.

Adapun usulan program kegiatan tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk Anggaran DAK Non Fisik diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Adanya bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) untuk mendukung penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya merupakan Program Unggulan Kementerian PP dan PA pada tahun 2016.
3. Dibutuhkan program untuk peningkatan sarana dan prasarana bagi UPTD PPA dalam peningkatan proses pelayanan.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional mengenai Prioritas Pembangunan Tahap Keempat RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) berdasarkan UU RPJPN Nomor 17 Tahun 2007 : Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema Pembangunan tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, adalah:

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP 2023 adalah :

1. PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program Prioritas :

1.1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

1.2 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

1.3 Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan

1.4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan

1.5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Dan Koperasi

1.6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi

1.7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

1.8 Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi

2. PRIORITAS NASIONAL 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Program Prioritas :

2.1 Pembangunan Wilayah Sumatera

2.2 Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

2.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

2.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan

2.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

2.6 Pembangunan Wilayah Maluku

2.7 Pembangunan Wilayah Papua

3. PRIORITAS NASIONAL 3

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas :

3.1 Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan

3.2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

3.3 Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

3.4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

3.5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda

3.6 Pengentasan Kemiskinan

3.7 Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing

4. PRIORITAS NASIONAL 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Program Prioritas :

4.1 Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter

4.2 Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

- 4.3Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial
- 4.4Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter

5. PRIORITAS NASIONAL 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas :

- 5.1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 5.2 Infrastruktur Ekonomi
- 5.3 Infrastruktur Perkotaan
- 5.4 Energi dan Ketenagalistrikan
- 5.5 Transformasi Digital

6. PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,

dan Perubahan Iklim

Program prioritas :

- 6.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 6.2 Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim
- 6.3 Pembangunan Rendah Karbon

7. PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas :

- 7.1 Konsolidasi Demokrasi
- 7.2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- 7.3 Penegakan Hukum Nasional
- 7.4 Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
- 7.5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Berdasarkan arah kebijakan nasional serta tugas dan fungsi

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Program Prioritas Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda, Kegiatan Prioritas : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dukungan ini dengan berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJMD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Tujuan I Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak

Sasaran :

- 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- 1.2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- 1.3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Tujuan II Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Sasaran :

- 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPPPA Provinsi Sumsel Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
I	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,30
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,50
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00
		1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	24,00
			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,00
			Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	%	57,65
			Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,90
		1.2 Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Nilai	8 - 10
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Nilai	7,00
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	69,00
		1.3 Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,00
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00-85,00)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA SELATAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
A	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	100	12,242,188,000	PAD	100	13,384,688,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
I	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Sumatera Selatan	100	25,000,000	PAD	100	40,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	2	10,000,000	PAD	2	20,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	4	15,000,000	PAD	4	20,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

II	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	Sumatera Selatan	100	7,982,963,000	PAD	100	9,228,865,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	40	6,766,735,000	PAD	47	8,078,865,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	1	956,228,000	PAD	30	850,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1	210,000,000	PAD	32	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
6	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	2	50,000,000	PAD	2	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
III	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	Sumatera Selatan	100	-	PAD	100	35,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
7	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1		PAD	1	35,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

IV	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Sumatera Selatan	100	135,000,000	PAD	100	500,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
8	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang				1	150,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
9	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang				1	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
10	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	5	90,000,000		10	200,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
11	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	-	-		70	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
12	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	45,000,000		6	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN
V	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	Sumatera Selatan	100	958,402,000	PAD	100	1,190,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
13	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	12	30,000,000	PAD	12	30,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

14	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	1	100,000,000	PAD	1	200,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
15	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Palembang	1	50,000,000	PAD			Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
16	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	8	200,000,000	PAD	8	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
17	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	4	60,000,000	PAD	4	75,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
18	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	1	10,000,000	PAD	1	10,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
19	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	1	50,000,000	PAD	1	75,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
20	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	2	458,402,000	PAD	2	500,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
21	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1		PAD	1	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

VI	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Selatan	100	900,000,000	PAD	100	750,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
22	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	2	900,000,000	PAD	1	750,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VII	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Selatan	100	575,000,000	PAD	100	560,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
23	2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1	10,000,000	PAD	1	10,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
24	2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1	280,000,000	PAD	1	300,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
25	2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	1	50,000,000	PAD	1	50,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
26	2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1	235,000,000	PAD	1	200,000,000	Peningkatan Tata Kelola ASN	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VIII	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD	Sumatera Selatan	100	1,665,823,000	PAD	100	1,080,823,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

27	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	17	275,000,000	PAD	17	300,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
28	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palembang	5	20,823,000	PAD	5	30,823,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
29	2.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Palembang	1	70,000,000	PAD	1	150,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
30	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1	1,300,000,000	PAD	1	500,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD yang Baik	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
31	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	-		PAD	1	100,000,000		
B	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada BL APBD	Sumatera Selatan	24.00	1,700,000,000	PAD	24.00	3,500,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

IX	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	Sumatera Selatan	85.00	450,000,000	PAD	73.00	400,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
32	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Palembang	1	250,000,000	PAD	1	250,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
33	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Palembang	100	200,000,000	PAD	70	150,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
X	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	Sumatera Selatan	10	250,000,000	PAD	10	1,800,000,000	Peningkatan Keterlibatan Perempuan di dalam Politik	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

34	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang mengikuti Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Palembang	1	100,000,000	PAD	1	300,000,000	Peningkatan Keterlibatan Perempuan di dalam Politik	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
35	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diAdvokasi dan didampingi dalam rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Palembang	10	150,000,000	PAD	10	1,500,000,000	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
XI	2..08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	Sumatera Selatan	47	1,000,000,000	PAD	48	1,300,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
36	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Palembang	20	700,000,000	PAD	45	1,050,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

37	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Palembang	27	100,000,000	PAD	100	100,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
38	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Palembang	1	200,000,000	PAD	1	150,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perempuan dalam Dunia Kerja	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
C	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indeks Kepuasan Masyarakat PPA	Sumatera Selatan	80-100 %	512,400,000	PAD	8-10	750,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
XII	2.08.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	Sumatera Selatan	100	132,400,000	PAD	88.24	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

39	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Palembang	1	50,000,000	PAD / DAK NF PPA	1	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
40	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Palembang	30	82,400,000	PAD	30	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
XIII	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	100	120,000,000	PAD	100	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
41	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Palembang	30	80,000,000	PAD	50	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

42	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Palembang	25	40,000,000	PAD / DAK NF PPA	30	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
XIV	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	Sumatera Selatan	27	260,000,000	PAD	27	400,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
43	2.08.03.1.03.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Palembang	-		PAD	1	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
44	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Palembang	50	150,000,000	PAD/ DAK NF PPA	75	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

45	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Palembang	-		PAD	150	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
46	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Palembang	1	110,000,000	PAD	1	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
D	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga	Sumatera Selatan	80 -100 %	300,000,000	PAD	70.58	750,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XV	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE kualitas keluarga	Sumatera Selatan	2	200,000,000	PAD	2	450,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
47	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Palembang	1	200,000,000	PAD	1	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

48	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Palembang	-			1	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XVI	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	Sumatera Selatan	10	50,000,000	PAD	10	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
40	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Palembang	50	50,000,000	PAD	100	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XVII	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	50	50,000,000	PAD	100	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

41	2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Palembang	1	50,000,000	PAD	1	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
E	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Sumatera Selatan	24.00	250,000,000	PAD	24.00	400,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
XVIII	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	Sumatera Selatan	100	250,000,000	PAD	76.47	400,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
42	2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Palembang	2	150,000,000	PAD	2	250,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

43	2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Palembang	2	100,000,000	PAD	2	150,000,000	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
F	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Nilai Evaluasi KLA Mengalami Peningkatan	Sumatera Selatan	100.00	610,000,000	PAD	100.00	1,100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XIX	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak	Sumatera Selatan	100	260,000,000	PAD	100	400,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
44	2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	1	100,000,000	PAD	1	150,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
45	2.08.06.1.01.03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Palembang	10	160,000,000	PAD	31	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

XX	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.	Sumatera Selatan	10	350,000,000	PAD		700,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	-		PAD	100	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Palembang	1	100,000,000	PAD	1	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
46	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Palembang	1	250,000,000	PAD	1	250,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
G	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan terselesaikan	Sumatera Selatan	100	1,270,000,000	PAD	60	1,950,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

XX	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	Sumatera Selatan	100	100,000,000	PAD	88.24	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
47	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Palembang	1	50,000,000	PAD / DAK NF PPA	1	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
48	2.08.07.1.01.03	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Palembang	50	50,000,000	PAD	50	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XXI	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	Sumatera Selatan	100	220,000,000	PAD	100	300,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

49	2.08.07.1.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Palembang	40	50,000,000	PAD	40	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Palembang	40	170,000,000	PAD / DAK NF PPA	40	200,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
XXII	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	Sumatera Selatan	25	950,000,000	PAD	27	1,550,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
50	2.08.07.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Palembang	1		PAD	1	50,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

	2.08.07.1.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Palembang	1		PAD	1	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
51	2.08.07.1.02.06	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Palembang	1	50,000,000	PAD	1	100,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
52	2.08.07.1.03.08	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Palembang	2	900,000,000	PAD / DAK NF PPA	2	1,300,000,000	Jenis Pelayanan Publik yang Efektif	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Jumlah						16,884,588,000			21,834,688,000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait secara langsung pada pencapaian Misi Kedua dengan Tujuan Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Sasaran Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan anak (Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan anak). Selain itu juga terkait dengan pencapaian Misi Kesatu dengan Tujuan Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dan Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta Misi Ketiga dengan Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Sasaran Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas), Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel (Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas) dan Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas (Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Sebagai Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				PROGRAM/ KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	KET
			RKPD		RENJA				
			TARGET	LOKASI	TARGET	LOKASI			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan •Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi •Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan bidang Politik,	

							Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi - Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi. • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	- Pelaksanaan Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga Peranan Perempuan dalam Ketahanan Keluarga Desiminasi Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga	

							Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
							• Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak		Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Progran Perlindungan Perempuan • Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Penyusunan Profil Gender dan	

							perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota • Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Profil Anak - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

								Kekerasan Kewenangan Provinsi - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Perlindungan Khusus Anak • Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi	

							perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi • Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi - Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi - Pengembangan Komunikasi,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah								Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.	
		Pemenuhan Hak Anak		Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Pemenuhan Hak Anak • Pelemabagaan PHA pada Lemabaga	- Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non	

							Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lemabaga Peyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi. - Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
				Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	

							• Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	- Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	
	Tata Kelola Pemerintah yang baik dan akuntebel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi		Prov. Sumsel		Prov. Sumsel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Jasa	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	

							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDs - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Komponen Instalasi	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Program/ Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Ribu Rp)	Ket	Cek Renja/ RKA	Catatan
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		Prov. Sumsel	➤ Program Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	1.700.000.000		√	
			➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000		√	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak		Prov. Sumsel	➤ Program Perlindungan Perempuan	512.400.000		√	
			➤ Program Perlindungan Khusus Anak	1.270.000.000		√	
Peningkatan pemenuhan hak anak		Prov. Sumsel	➤ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	250.000.000		√	
			➤ Program Pemenuhan Hak Anaks	610.000.000		√	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi		Prov. Sumsel	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.242.188.000		√	

BAB V

PENUTUP

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Penyusunan Renja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang baik, sehingga diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui rencana kerja pula dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Di dalam Renja ini berisi kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan organisasi yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renja organisasi Tahun 2025 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Sumatera Selatan;
3. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Renja ini akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis, sehingga diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stakeholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan kepada pimpinan secara organisasi, secara moral akan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Oleh karena itu diminta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh integritas dan tanggung jawab.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah diupayakan sebaik – baiknya, terukur dan akuntabel. Namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Renja ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 196903281989082002

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						16.884.558.000,00							22.314.688.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.884.558.000,00							22.314.688.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						16.884.558.000,00							22.314.688.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	12.242.158.000,00						-	13.864.688.000,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan evaluasi kinerja PD	-			100 %	25.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	-			100 %	7.982.963.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	9.228.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	6.766.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		8.078.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	956.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	210.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	-			100 %	0,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-	-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	135.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	90.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	45.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	958.372.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	1.190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	60.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	458.372.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 %	900.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	900.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	575.000.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	560.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	280.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	235.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	1.665.823.000,00			-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	1.560.823.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	275.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.823.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		30.823.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	70.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.300.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 4 : Meningkatk an Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada BL APBD	-			24,00 %	1.700.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	-			73,00 %	450.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Dokumen	200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	-			10 %	250.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	1.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Orang	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				10 Lembaga	150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	-			47 %	1.000.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				20 Lembaga	700.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		1.050.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				27 Orang	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 2 : Meningkatk an Infrastru ktur dan Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indeks Kepuasan Masyarakat PPA	-			8-10 Indeks Kepuasan	512.400.000,00						-	750.000.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	-			88,24 %	132.400.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				30 Perangkat Daerah	82.400.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejaht eraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	-			100 %	120.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				30 Orang	80.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				30 Layanan	40.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	-			27 %	260.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				150 Orang	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga	-			70,58 %	300.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE kualitas keluarga	-			2 %	200.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	-			10 %	50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	-			100 %	50.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Layanan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-			24,00 %	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	-			76,47 %	250.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatk an Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Nilai Evaluasi Kla Mengalami Peningkatan	-			100 %	610.000.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak</i>	-			100 %	260.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			<i>umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi</i>				31 perangkat daerah	160.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</i>	-			100 %	350.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			<i>Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			<i>Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak</i>				1 Kegiatan	250.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Dan Terselesaikan</i>	-			60 %	1.270.000.000,00						-	1.950.000.000,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak</i>	-			88,35 %	100.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif</i>	-			100 %	220.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	50.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi</i>				40 Layanan	170.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	-			25 %	950.000.000,00			-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	1.550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi															
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				3 Kegiatan	0,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi															
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan															
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				100 Orang	900.000.000,00	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	J U M L A H							16.884.558.000,00							22.314.688.000,00		